

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN
REMBUK DAN MUSYAWARAH NASIONAL**

TENTANG

RENCANA AKSI BELA NEGARA TAHUN 2018-2019

Hotel Bidakara Jakarta 19 s.d 20 Desember 2018

Jakarta, Januari 2019

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN
REMBUK DAN MUSYAWARAH NASIONAL**

TENTANG

RENCANA AKSI BELA NEGARA TAHUN 2018-2019

Hotel Bidakara Jakarta 19 s.d 20 Desember 2018

1. Rembuk Nasional

Rembuk Nasional Bela Negara merupakan salah satu realisasi dari amanat Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 – 2019. Tujuan Rembuk Nasional adalah untuk memperoleh pemahaman bersama tentang Bela Negara. Selain itu, diharapkan melalui forum Rembuk Nasional ini, seluruh K/L dan Pemda dapat memberikan saran masukan untuk pelaksanaan aksi Bela Negara.

Dalam pengarahannya pembukaan Menko Polhukam, substansi yang ditekankan menyangkut esensi definisi Bela Negara yaitu kesadaran dari suatu bangsa yang terdiri substansi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Ditekankan pula bahwa Bela Negara telah tercantum dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam sambutannya Sesjen Wantannas menekankan pada beberapa hal, bahwa Rencana Aksi Bela Negara berdasarkan atas pendekatan Astragatra yang berbasis pada Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam aspek ekonomi, Program Bela negara mendorong agar pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Pengelolaan SDA harus menghindari terjadinya benturan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Dalam aspek politik, rakyat Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar harus memiliki ketaatan yang tinggi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di bidang sosial budaya, Indonesia harus mampu secara terus menerus mencegah dan mengatasi permasalahan terkait adanya ego sektoral dalam pemerintahan, kejahatan korupsi, pengaruh negatif dari ekspansi budaya asing, fanatisme sempit keagamaan dan maraknya pemberitaan bohong (*hoax*) serta kondisi darurat narkoba. Di bidang pendidikan dan Iptek, perlu peningkatan dan penguatan etos kerja untuk mengantisipasi penguasaan lapangan kerja oleh

tenaga asing. Pola kerja dengan paradigma lama harus berubah, untuk mengantisipasi perkembangan terkait revolusi industri 4.0, khususnya bagi kalangan generasi milenial.

Meskipun ancaman militer kecenderungannya menurun, namun kesiapan pada aspek pertahanan tetap perlu dikelola secara baik dengan memperhatikan skala prioritas. Maka sehubungan dengan itu, semua elemen masyarakat dan bangsa mempunyai kewajiban untuk ikut serta mengantisipasi dan menangani ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan nirmiliter. Di bidang lingkungan hidup, perlu didorong secara benar dan berkelanjutan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Hingga saat ini, Indonesia menghadapi dampak dari kerusakan ekosistem di berbagai daerah. Banyak masyarakat di berbagai daerah telah menderita berbagai jenis penyakit sebagai akibat dari kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian laboratorium, penyakit yang dialami masyarakat disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih, misalnya karena mengandung logam berat, arsenik, air raksa, dan juga bakteri e-coli, salmonela.

Dalam mengimplementasikan program kegiatan Bela Negara, sangat ditekankan peran *Pentahelix*, yaitu pelibatan unsur-unsur: Pemerintah, kalangan akademisi, pelaku dunia usaha, komunitas dan media. Sinergitas dari kelima unsur *pentahelix* diharapkan mampu mengimplementasikan aksi-aksi nasional Bela Negara sebagaimana yang diinstruksikan dalam Inpres No. 7 Tahun 2018. Di samping itu, dengan mengacu pada keberhasilan pengelolaan dan pengembangan potensi atau keunggulan lokal, diperkenalkan pula Program Emas Biru dan Emas Hijau untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Dalam program Bela Negara ini diaplikasikan dengan mendorong seluruh prov, kab/kota untuk mengembalikan entitas tanaman asli Indonesia.

Agenda utama dalam forum Rembuk Nasional meliputi sosialisasi tentang Inpres Nomor 7 Tahun 2018, Modul Utama Bela Negara yang disusun oleh Setjen Wantannas, Pendidikan dan Latihan (ToT), dan Sistem Pelaporan Bela Negara. Sosialisasi menyangkut hal-hal tersebut di atas perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat lebih diterima dengan pemahaman yang memadai oleh seluruh lapisan atau seluruh komponen bangsa.

Beberapa catatan penting dari penyelenggaraan Rembuk Nasional adalah sebagai berikut:

1. RAN Bela Negara pada tahun 2018 hanya memiliki waktu 3 bulan sehubungan terbitnya Inpres pada tanggal 18 September 2018, sehingga terdapat keterbatasan waktu dan anggaran dalam mengimplementasikannya.
2. Fokus kegiatan tahun 2018 adalah tahap sosialisasi berupa Rembuk Nasional dan Musyawarah Nasional yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyusun program kegiatan Bela Negara sesuai Inpres No. 7 Tahun 2018.

3. Kegiatan RAN Bela Negara tahun 2019 yang mencakup tahapan sosialisasi dan internalisasi belum didukung anggaran yang sangat diperlukan sebagai tahap awal kegiatan. Sementara anggaran Tahap Aksi Gerakan melekat pada RKA-KL masing-masing dengan melakukan penyesuaian seperlunya.
4. Pada dasarnya sebagian besar K/L dan Pemda telah melaksanakan program dan kegiatan Aksi Bela Negara, namun dengan nomenklatur yang berbeda.
5. Sinergi peran *Pentahelix* perlu dilembagakan pada setiap pelaksanaan Aksi Nasional Bela Negara.

2. Musyawarah Nasional

Musyawah Nasional juga merupakan bagian dari salah satu realisasi pentahapan dalam Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 – 2019. Musyawarah Nasional Bela Negara Tahun 2018 bertujuan menyelaraskan dan mensinkronkan program Bela Negara di masing-masing K/L dan pemerintah daerah agar sesuai dengan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

Memahami perkembangan lingkungan strategis, pemerintah memandang perlu adanya suatu upaya untuk membangun dan memantapkan karakter bangsa dengan suatu upaya Bela Negara. Presiden menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang mengamanatkan agar program-program Aksi Nasional Bela Negara dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Aksi-Aksi nasional bela Negara ini adalah untuk menjawab AGHT dari berbagai aspek terutama dari lingkup nirmiliter. Setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan program yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsinya masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Dihadapkan pada tingkat kehadiran pejabat yang berwenang dalam penyusunan program di lingkungan K/L dan Pemda, perlu kerjasama dan langkah tindaklanjut yang intens, agar dapat tersusun program aksi Bela Negara sesuai amanat Inpres tersebut di atas. Kehadiran peserta baik dari K/L maupun pemerintah daerah pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Penyusunan Program Bela Negara Tahun 2018 belum maksimal. Dari 166 K/L yang di undang hadir 116, dari 34 Provinsi yang diundang hadir 15, dan dari 514 Pemda Kab/Kota yang diundang hadir 53. Minimnya tingkat kehadiran peserta dari masing-masing K/L dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimungkinkan karena pelaksanaan Munas sudah di penghujung akhir tahun, dimana dukungan anggaran dari masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah sudah tidak teralokasikan untuk mengikuti kegiatan dimaksud, khususnya peserta yang berasal dari luar Jawa.

Selain mensosialisasikan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 kepada Pejabat yang terkait dengan program Bela Negara, materi yang disampaikan pada Munas lebih menitik beratkan pada terwujudnya kesepahaman tentang program-program Bela Negara dari masing-masing K/L dan Pemda. Program yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 perlu disinkronkan dan diselaraskan dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Dari interaksi para peserta selama Munas, secara umum materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh peserta. Namun masih perlu dilaksanakan sosialisasi lebih lanjut menyangkut Inpres Nomor 7 Tahun 2018 untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan Munas, telah disepakati perlunya penyusunan nota kesepakatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk matriks 8 (delapan) kolom sebagai penyelarasan antara Program Aksi Nasional Bela Negara sesuai Inpres No. 7 Tahun 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Nota Kesepakatan ditandatangani antara Sesjen Wantannas dengan Sekretaris Jenderal Kementerian atau Pejabat yang berwenang di K/L dan Pemda.

Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama yaitu; bahwa penyelarasan dan sinkronisasi program Bela Negara dimasing-masing K/L dan Pemda perlu dilakukan, agar sesuai dengan salah satu program prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Materi yang telah disampaikan dalam Munas meliputi: Penjelasan secara garis besar Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; Penjelasan Modul Utama Bela Negara sebagai acuan K/L dan Pemda dalam menyusun Modul Khusus; Penjelasan Rencana Garis Besar Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (ToT); Penjelasan tentang Sistem dan Mekanisme Pelaporan Aksi Belneg di tiap-tiap K/L maupun Pemda; dan Penjelasan Penyusunan Program Kerja Belneg Tahun 2019.

Dengan terselenggaranya Rembuk dan Munas Bela Negara, maka capaian sementara dari implementasi Inpres No. 7 Tahun 2018 antara lain mencakup:

1. Tersusunnya Modul Utama Pembinaan Bela Negara.
2. Terdistribusinya Modul Utama Pembinaan Bela Negara kepada seluruh K/L & Pemda.
3. Terselenggaranya Rembuk Nasional Bela Negara yang dihadiri K/L dan Pemda.
4. Terselenggaranya Musyawarah Nasional Penyusunan Program Bela Negara.

Menyikapi beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 2018, maka perlu kerjasama yang lebih erat dari para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan RAN Bela Negara termasuk sistem pelaporan yang akan dilaksanakan secara online.
2. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan RAN Bela Negara dengan mengedepankan peran Pentahelix.
3. Meningkatkan partisipasi seluruh warga negara yang berada di dalam dan luar negeri dalam Aksi Nasional Bela Negara.

Rekomendasi yang dapat diajukan bersama untuk kelancaran pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 2018 meliputi sebagai berikut:

1. Perlunya sinergitas yang kuat dan pelembagaan peran Pentahelix, karena akan menjadi kunci keberhasilan RAN Bela Negara pada tahun 2019. Penanggung jawab aksi harus mampu menggandeng semua elemen, khususnya pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, dan komunitas.
2. Perlu perumusan yang tepat dari konsep pelaksanaan Aksi Nasional Bela Negara untuk mengatasi kendala anggaran guna kelancaran operasional secara menyeluruh RAN Bela Negara tahun 2019. Aksi yang dimaksud mencakup tahap Sosialisasi, tahap internalisasi nilai-nilai dasar Bela Negara dan kegiatan pemantauan serta evaluasi tahap aksi gerakan.
3. Perlunya membangun sistem informasi dan pelaporan Bela Negara yang mampu dengan cepat menyajikan informasi, analisa dan pelaporan yang akurat.

Guna mendapatkan gambaran utuh tentang hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan Rembug dan Munas Belneg, mohon dapatnya K/L maupun Pemda mengakses informasi yang diperlukan melalui Website Setjen wantannas (www.wantannas.go.id).

Demikian disampaikan rekapitulasi hasil pelaksanaan Rembuk dan Musyawarah Nasional tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019 agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi tiap-tiap K/L maupun Pemda untuk pelaksanaan aksi Bela Negara selanjutnya.